

PENDIDIKAN DEMOKRASI MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF KH. ABDURAHMAN WAHID (Sebuah Tawaran untuk Mewujudkan Demokrasi di Indonesia yang Harmonis)

Ahmad Hanif Fahrudin

Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Lamongan

kanghanif88@unisla.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan sebuah negara multikultural terbesar di dunia. Keberagaman ini tercermin pada berbagai macam bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai macam aliran kepercayaan. Beraneka ragamnya bahasa, budaya dan agama ini selain menjadi sebuah kekayaan, juga dapat menjadi sumber konflik, apabila tidak dilihat sebagaimana mestinya maka budaya serta agama cenderung menjadi fanatik pada budaya atau agamanya sendiri dan melupakan kesatuan bangsa ini. Sikap fanatisme cenderung terdapat pada masyarakat sosial tertutup, hal ini dikarenakan masyarakat yang cenderung statis atau menerapkan stratifikasi pada masyarakat bersifat tertutup. Tidak menutup kemungkinan konflik akan terjadi karena perbedaan masyarakat yang ada di Indonesia melalui pemelihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota, propinsi atau pemilihan presiden karena pemahan masyarakat eksklusif. Akan tetapi upaya untuk terus merawat kebhinekaan yang harmonis terus dilakukan diantara adalah penerapan ajaran KH. Abdurrahman Wahid tentang pendidikan Demokrasi Multikultural. Diantara pemikiran Gus Dur tentang pendidikan demokrasi multikultural adalah Kedaulatan Hukum, Menegaakkan Peradilan yang Beba, Adanya Instansi yang melakukan kajian tentang kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan konstitusi, Penegakan Hak Asasi Manusi, Peningkatan

Kesejahteraan Rakyat, Penghargaan Terhadap Prulalitas, Pemberdayaan Masyarakat Sipil, dan Relevansi Islam dan Demokrasi.

Kata Kunci: demokrasi, pendidikan multikultural, KH. Abdurrahman Wahid

Abstract

Indonesia is one of the largest multicultural countries in the world. This diversity is reflected in various languages, cultures, and religions and beliefs such as Islam, Catholicism, Protestant Christianity, Hinduism, Buddhism, Confucianism and various beliefs. This variety of languages, cultures and religions, in addition to being a wealth, can also be a source of conflict, if not properly viewed, culture and religion tend to become fanatical in their own culture or religion and forget the unity of this nation. Attitudes of fanaticism tend to exist in a closed social society, this is because people who tend to be static or applying stratification to society is closed. It is possible that the conflict will occur because of differences in society in Indonesia through the head of the district / city, provincial or presidential election due to the exclusion of the exclusive society. However, efforts to continuously maintain the harmonious diversity continues between the application of KH. Abdurrahman Wahid teaching on the education of Multicultural Democracy. Among Gus Dur's thoughts on multicultural democracy education are Legal sovereignty, enforcement of bureaucratic judiciary, the existence of institutions that conduct studies on the

conformity of legislation with the constitution, Human Rights Enforcement, Improvement of People's Welfare, Appreciation of Prulality, Empowerment of Civil Society, and Relevance Islam and Democracy.

Keywords: Democracy, Multicultural Education, KH. Abdurrahman Wahid

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara multikultural terbesar di dunia. Kebenaran dari pernyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Sekarang jumlah pulau yang ada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekitar 13.000 pulau besar dan kecil. Populasi penduduknya berjumlah lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai macam aliran kepercayaan. (M. Ainul Yaqin, 2005: 4).

Masyarakatnya Indoneisa dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks ini menjadi sebuah kekayaan dan kekhasan bagi Indonesia, keragaman yang diperkuat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maknanya, meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Beraneka ragamnya budaya ini selain menjadi sebuah kekayaan, juga dapat menjadi sumber konflik, apabila tidak dilihat sebagaimana mestinya dan setiap budaya cenderung menjadi fanatik

pada budaya sendiri dan melupakan kesatuan bangsa ini. Sikap fanatisme cenderung terdapat pada masyarakat sosial tertutup, hal ini dikarenakan masyarakat yang cenderung statis atau menerapkan stratifikasi pada masyarakat bersifat tertutup.

Gambaran konflik karena tidak dikelolanya kekayaan bisa dilihat kondisi masyarakat Indonesia pasca Pilkada DKI Jakarta yang mengalami polarisasi yang luar biasa panas. Parahnya, polarisasi tersebut didasarkan pada perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) yang selama ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Direktur Program dan Pengembangan Pemantapan Kedeputan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Brigjen Rafli menilai kondisi ini disebabkan akrobat politik yang kelewatan. Menurutnya, kebebasan berpolitik sejatinya jangan dimaknai sebebaskan-bebasnya. Sehingga berani menabrak norma yang selama ini melekat dalam kehidupan masyarakat.

Kalau dilihat pada konflik hari ini, terdapat beberapa faktor penyebab hancurnya nilai kebhinnekaan itu. *Pertama*, perbedaan yang ditonjolkan. *Kedua*, intoleransi, Intoleransi belakangan ini hampir tumbuh subur. Berbagai teror dan ancaman terhadap kelompok tertentu, bahkan sampai melakukan aksi bom bunuh diri dan lain sebagainya adalah buktinya. Aksi-aksi yang mengarah kepada intoleransi harus segera diatasi karena, sekali lagi, dapat merusak kebhinnekaan yang sudah lama dan terbukti mampu mewujudkan harmoni di bumi pertiwi. *Ketiga*, provokasi. Ujaran kebencian terhadap seseorang atau kelompok tertentu tanpa alasan yang mendasar menjadi benih-benih sikap destruktif terhadap seseorang atau kelompok tertentu itu. Isu suku, agama, ras, dan

golongan (SARA) menjadi senjata kelompok provokator ini.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia kurang bisa memahami arti keberagaman yang ada di Indonesia, mereka lebih memilih sifat eksklusif, yaitu menafikan hak hidup agama, suku, dan atau golongan lain, seakan-akan hanya agama, suku atau golongannya sendiri yang benar dan mempunyai hak hidup, sementara agama, suku, atau golongan yang lain salah. Seharusnya keberagaman yang ada di Indonesia ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan inklusif dan pluralis. Berkaitan dengan hal ini, maka penting untuk terus membumikan dan mengimplementasikan gagasan-gagasan tentang multikultural, plural, dan kebhinekaan.

Demokrasi dalam Konsep

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *demokratia* (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke 5 dan ke 4 SM di kota Yunani Kuno khususnya Athena. (Azumardi Azra, 2005: 125).

Dapat diartikan secara umum bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang.

Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan, akan tetapi pemakaian konsep ini di

zaman modern dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-20 dalam perdebatan mengenai arti demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah dan prosedur untuk membentuk pemerintahan (Samuel P. Huntington: 4). Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, corak pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat. Sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat. (Zakaria Bangun, 2008: 2).

Layaknya sebuah sistem, demokrasi juga mempunyai konsep, ciri-ciri, model dan mekanisme sendiri. Yang mana semuanya itu merupakan satu kesatuan yang dapat menjelaskan arti, maksud dan praktek sistem demokrasi.

a. Konsep-Konsep Demokrasi

Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan rakyat, dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara. Sehingga tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk orang-orang tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari

demokrasi yang salah arah. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people for the people*). (Munir Fuady, 2010: 29).

b. Model-model Demokrasi

Berangkat dari pemaknaan yang sama dan karenanya universal, demokrasi substansial, telah memberikan daya pikat normatif. Bahwa dalam demokrasi, mestinya berkembang nilai kesetaraan (egalitarian), keragaman (pluralisme), penghormatan atas perbedaan (toleransi), kemanusiaan atau penghargaan atas hak-hak asasi manusia, “kebebasan”, tanggung jawab, kebersamaan dan sebagainya. Secara substansif demokrasi melampaui maknanya secara politis. (Ni'matul Huda, 2010: 207).

Sebagai suatu sistem politik demokrasi juga mengalami perkembangan dalam implementasinya. Banyak model demokrasi hadir di sini, dan itu semua tidak lepas dari ragam perspektif pemaknaan demokrasi substansial. Menjadikan demokrasi berkembang ke dalam banyak model, antara lain karena terkait dengan kreativitas para aktor politik di berbagai tempat dalam mendesain praktik demokrasi prosedural sesuai dengan kultur, sejarah, dan kepentingan mereka.

Sejarah teori demokrasi terletak suatu konflik yang sangat tajam mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat (suatu bentuk

politik di mana warga negara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri) atau suatu bantuan bagi pembuatan keputusan (suatu cara pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui pemberian suara secara periodik).

c. Ciri-ciri Demokrasi

Dilihat dari pemilihan umum secara langsung telah mencerminkan sebuah demokrasi yang baik dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Menurut Sri Soemantri sebuah negara atau pemerintah bisa dikatakan demokratis apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (Azyumardi Azra, 2005: 122).

- 1) Negara terikat pada hukum maksudnya bukan berarti bahwa kekuasaan negara terikat pada hukum. Bukan seakan-akan negara hukum adalah sama dengan demokrasi. Negara hukum tidak mesti negara demokratis. Pemerintahan monarki dapat taat pada hukum, tetapi demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum
- 2) Kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat
- 3) Pemilu yang bebas
- 4) Prinsip mayoritas maksudnya adalah bahwa Badan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan-keputusannya secara sepakat

- atau jika kesepakatan tidak tercapai bisa dengan suara terbanyak
- 5) Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis
- d. Mekanisme Demokrasi
- Proses demokratisasi dalam sebuah kasus dapat dikelompokkan kedalam tiga tipe proses diantaranya yaitu: (Samuel P. Huntington, 1997: 146).
- a) Transformasi (*reforma*, dalam istilah Linz) terjadi ketika elite yang berkuasa memelopori proses perwujudan demokrasi. Pada transformasi pihak-pihak yang berkuasa dalam rezim otoriter memelopori dan memainkan peran yang menentukan dalam mengakhiri rezim itu dan mengubahnya menjadi sistem demokratis. Transformasi mensyaratkan pemerintah lebih kuat dari pada oposisi. Dengan demikian, transformasi terjadi dalam rezim militer yang telah mapan dimana pemerintah jelas-jelas mengendalikan alat-alat koersi yang utama kalau dibandingkan dengan pihak oposisi dan atau dibandingkan dengan sistem otoriter yang sukses secara ekonomi.
- b) Pergantian (*replacement*, atau ruktura dalam istilah Linz) terjadi ketika kelompok oposisi memelopori proses perwujudan demokrasi, dan rezim otoriter tumbang atau digulingkan. Proses *replacement* ini terdiri dari tiga fase yang berbeda:
- perjuangan untuk menumbangkan rezim, tumbangnya rezim dan perjuangan setelah tumbangnya rezim.
- c) *Transplacement* atau "*ruptforma*" terjadi apabila demokratisasi terutama merupakan hasil tindakan bersama kelompok pemerintah dan kelompok oposisi. Pada tipe ini demokratisasi merupakan hasil aksi bersama pemerintah dan kelompok oposisi. Di dalam pemerintah itu
- e. Kegagalan Demokrasi
- Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung pada empat faktor kunci yaitu: *pertama*, komposisi elit politik. *Kedua*, desain institusi politik. *Ketiga*, kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non elit. *Keempat*, peran *civil society* (masyarakat madani). Keempat faktor itu harus berjalan secara sinergis (bekerja sama) dan sebagai modal untuk mengonsolidasikan (keteguhan) demokrasi. Karena itu seperti dikemukakan oleh Azyumardi Azra langkah yang harus dilakukan dalam masa transisi Indonesia menuju demokrasi mencakup reformasi dalam bidang besar. Pertama reformasi sistem (*constitutional reform*) yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar dan perangkat legal sistem politik. Kedua reformasi kelembagaan (*institutional reform and empowerment*) yang menyangkut pengembangan

dan pemberdayaan lembaga-lembaga politik. Ketiga, pengembangan kultur atau budaya politik (*political culture*) yang lebih demokratis.

Pendidikan Multikultural

Multikulturalisme, secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sistem nilai atau kebijakan yang menghargai keragaman dalam suatu masyarakat yang didasarkan kepada kesediaan untuk menerima dan menghargai keberadaan kelompok lain yang berbeda suku, etnik, gender, maupun agama. Secara normatif-teologis, Islam sebenarnya sejak awal telah mengajarkan nilai-nilai penghormatan dan penghargaan atas keberbedaan yang ada, apapun perbedaan yang muncul di bumi ini. (Agus Mahfud, 2012: 122).

Ada tiga (3) persepektif untuk melihat kaitan antara Islam dengan Pendidikan Multikultural:

a. Persepektif Teologis

Ada beberapa ayat Al Qur'an yang secara jelas sangat apreatif terhadap tumbuhnya nilai-nilai perbedaan, baik gender, bangsa maupun suku, diantaranya Surat Al-Hujarat: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang

paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Juga pada surat ar-Rum: 22 yang ditunjukkantentang keharusan untuk saling menghormati dan menghargai di antara perbedaan bahasa dan warna kulit. Dikatakan, bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ
أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Dua ayat al Qur'an yang pertama, al-Hujarat: 12 dan ar-Rum: 22 di atas, telah memberikan beberapa aksentuasi penting tentang perbedaan gender, bangsa, suku, bahasa, warna kulit, adalah semata-mata perbedaan artifisial yang sudah dikonstruksi oleh Allah SWT dalam rangka pemenuhan kebutuhan kelengkapan hidup dan kehidupan di dunia.

b. Persepektif Historis

Nabi Muhammad SAW sendiri telah hidup ditengah-tengah komunitas yang sangat prulal dan multikultural. Beliau membangun kebersamaan di tengah keberagaman atas dasar teologi "lailaha illah" di mekah selama 13 tahun, kemudian hijrah ke Yasrib, yang kemudian berganti nama menjadi Madinah Al Munawwaroh. Masyarakat tidak hanya terdiri dari satu etnis, suku, bangsa, maupun agama; namun sangat beragam. Ada sejumlah suku yang dominan

mendiami kota itu yaitu Suku Aus, Khajraj, Qoinuqa, Quraidlah, dan Bani Nadzir. Demikian pula penduduknya menganut beragam agama: Islam, Yahudi, dan sebagian kecil Kristen Najran.

c. Persepektif Sosiologis

Islam Multikultural adalah sebetuk Persepektif teologis tentang penghargaan terhadap keraman. Suatu *asesment* teologis mengenai agama lain, kultur lain, dan etnik lain, dan penempatannya secara layak dalam wialayah tatanan publik etis. Ia merupakan teologis Qur'ani.

Realitas Islam Multikultural di Indonesia sangat kental, baik secara sosio-historis maupun global (global-lokal). Secara lokal, Islam di Nusantara dibagi oleh Clifford Geertz dalam trikotomi: santri, abangan dan priyayi; atau dalam perspekrif dikotomi Deliar Noer, yaitu Islam Tradisional dan Modrn.

Sedangkan Nilai-nilai Pendidikan Multikultural bisa dilihat sebagai berikut: Menurut Muhamad Tholhah Hasan, dalam kajian-kajian keaswajaan atau Islam Inklusif, terdapat akar nilai-nilai karakter inklusif yang mendorong terwujudnya budaya multikulturalis dalam suatu masyarakat atau bangsa, diantaranya sebagai berikut: At-Ta'aruf (Saling menganal), At Tawassuth (moderat), At Tassamuh (toleran), At Ta'awun (tolong-menolong), dan At Tawazun (harmoni). (Muhamad Tholhah Hasan, 2016: 60).

Adapun menurut Abdullah Aly, nilai inti dari pendidikan multikultural ada tiga, yaitu: 1) nilai demokrasi, kesetaraan, dan keadilan; 2) nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian; serta

3) sikap sosial, yaitu: pengakuan, penerimaan, dan penghargaan kepada orang lain. (Abdullah Aly, 2015).

Dalam bukunya Pendidikan Multikultural, M. Ainul Yakin merumuskan tujuh nilai pendidikan multikultural yang seyogyanya ditanamkan dalam diri siswa, yaitu; a) paradigma keberagaman inklusif, b) menghargai keragaman bahasa, c) membangun sikap sensitif gender, d) membangun pemahaman kritis terhadap ketidakadilan dan perbedaan status sosial, e) membangun sikap anti diskriminasi, dan f) menghargai perbedaan kemampuan, g) Toleransi. (M. Ainul Yaqin, 2005: xxi-xxiii). Komposisi ini sedikit berbeda dengan yang dirumuskan oleh Khairul Anam Sidded, dkk. Yang menjelaskan bahwa nilai-nilai pendidikan multikulturalisme mencakup; a) cinta, b) keadilan, c) toleransi, d) menghormati keragaman budaya, e) kerjasama, dan f) kerja keras. (Nizar Ali dalam Khairul Anam Sidded, 2009: x).

Biorgrafi Singkat KH. Abdurrahman Wahid

Abdurrahman "Addakhil", demikian nama lengkapnya. Secara leksikal "Addakhil" berarti "Sang Penakluk" sebuah nama yang diambil KH. Wahid Hasyim, orang tuanya dari tokoh perintis Dinasti Umayyah yang telah menancapkan tonggak kejayaan Islam di Andalusia (Spanyol). Belakangan kata "Addakhil" tidak cukup dikenal dikalangan masyarakat dan diganti nama "Wahid", Abdurrahman Wahid, dan kemudian lebih dikenal dengan dengan panggilan Gus Dur. "Gus" adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak Kyai yang berarti "abang" atau "mas".

Gus Dur. Ia dilahirkan pada 4 Agustus 1940 di sebuah tempat yang kental dengan suasana kesantrian dan religi, Denanyar Jombang Jawa Timur, lokasi dimana Nahdlatul Ulama dilahirkan. Ayahnya yang sangat dicintai dan dikagumi dan banyak mewarisi sikap toleransinya, KH. Wahid Hasyim, adalah putra KH. Hasyim Asy'ari. Adapun ibunya Hajjah Sholihah adalah putri sulung KH. Bisri Syamsuri. Baik nenek dari pihak bapaknya maupun dari pihak ibunya, kedua-duanya adalah tokoh besar dan pendiri Nahdlatul Ulama, sehingga keberadaan Gus Dur di NU mewakili keduanya.

Kehadiran anak bernama Gus Dur ini sangat membahagiakan kedua orangtuanya, karena ia adalah anak laki-laki dan pertama. Ia dipenuhi oleh optimisme seorang ayah. Ini bisa terlihat dari pemberian nama Abdurrahman Ad Dakhil, terutama kata Ad Dakhil dari nama pahlawan dari dinasti Umayyah yang secara harfiah mempunyai arti "Sang Penakluk". (Agus Mahfud, 2012: 112).

Dalam kesehariannya, Gus Dur mempunyai kegemaran membaca dan rajin memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Selain itu ia juga aktif berkunjung ke perpustakaan umum di Jakarta. Pada usia belasan tahun Gus Dur telah akrab dengan berbagai majalah, surat kabar, novel dan buku-buku yang agak serius. Karya-karya yang dibaca oleh Gus Dur tidak hanya cerita-cerita, utamanya cerita silat dan fiksi, akan tetapi wacana tentang filsafat dan dokumen-dokumen manca negara tidak luput dari perhatian.

Masa remaja Gus Dur sebagian besar dihabiskan di Yogyakarta dan Tegalrejo. Di dua tempat inilah pengembangan ilmu pengetahuan mulai meningkat. Masa berikutnya, Gus Dur tinggal di Jombang

Dalam ranah pendidikan, Gus Dur Kecil belajar pada sang kakek, KH. Hasyim Asy'ari. Saat serumah dengan kakeknya, ia diajari mengaji dan membaca al Qur'an. Dalam usia lima tahun ia telah lancar membaca Al Qur'an. Pada saat sang ayah pindah ke Jakarta, di samping belajar formal di sekolah, Gus Dur masuk juga mengikuti les privat Bahasa Belanda. Guru lesnya bernama Willem Buhl, seorang jerman yang telah masuk Islam yang mengganti namanya dengan Iskandar.

Setelah lulus dari Sekolah Dasar, Gus Dur dikirim orang tuanya untuk belajar di Yogyakarta. Pada tahun 1953 ia masuk SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) Gowongan, sambil mondok di pesantren Al Munawir Krapyak, asuhan KH. Ali Ma'sum. Sekolah ini meskipun dikelola oleh Gereja Katolik Romah, akan tetapi sepenuhnya menggunakan kurikulum sekuler. Di sekolah ini pula Gus Dur pertama kali belajar bahasa Inggris dan juga ia dapat membaca tulisan dalam bahasa Perancis dan Belanda. (Greg Barton, 2002: 52).

Setamat dari SMEP Gus Dur melanjutkan belajar di Pesantren Tegalrejo Magelang Jawa Tengah. Pesantren ini diasuh oleh KH. Chudlari, sosok kyai yang humanis, saleh dan guru dicintai. Kyai Chudlari inilah yang memperkenalkan Gus Dur dengan ritus-ritus sufi dan menanamkan praktek ritual mistis.

Setelah menghabiskan dua tahun di pesantren Tegalrejo, Gus Dur pindah kembali ke Jombang, dan tinggal di Pesantren Tambak Beras Jombang. Saat itu usianya mendekati 20 tahun, sehingga di pesantren milik pamannya, KH. Abdul Fattah, ia menjadi seorang ustadz dan ketua keamanan pondok. Pada usia 22 tahun, Gus Dur berangkat ke tanah suci, untuk menunaikan ibadah haji, yang kemudian diteruskan ke Mesir untuk melanjutkan studi di

Pendidikan Demokrasi
Multikultural Ajaran KH.
Abdurrahman Wahid

Dalam hal ini kita bisa mengaca dan meneladani pemikiran-pemikiran KH. Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab disapa Gus Dur dalam memahami Demokrasi yang seutuhnya. Pemikiran-pemikiran Gus Dur tentang Demokrasi yang multikultural bisa dilihat sebagai berikut: (M. Yahya Al-Mustaufi, 2014: 5).

Gus Dur berpendapat bahwa konstitusi hekekatnya mengatur tentang kekuasaan dan hubungan kekuasaan di dalam negara, dan sekaligus mengeluhkan hak-hak warganegaranya, berikut menjamin perlindungan baginya. Keberadaan konstitusi juga dimaksudkan untuk menjamin warganegara dari kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan negara.

dimaksudkan agar kebutuhan minimal masyarakat yang berupa terpenuhinya kebutuhan pokok sehari-hari orang kecil.

Konstitusi dalam pandangan Gus Dur tidak hanya mengatur kekuasaan di dalam negara, akan tetapi lebih dari itu, ia membebaskan batas tegas wewenang kekuasaan negara di satu sisi, dan di sisi lain konstitusi meneguhkan hak-hak warganegaraanya serta memberikan perlindungan baginya. Hal tersebut untuk menghindari segala tindakan inkonstitusional, baik melalui keputusan pejabat maupun peraturan perundang-undangan perlu ditegakkan sebuah peradilan yang bebas.

Harus adanya Instansi yang melakukan kajian tentang kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan konstitusi. Gus Dur menyatakan bahwa konstitusi diadakan untuk menjamin warga negara dari kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan negara. Ini didasarkan faham bahwa pemegang kekuasaan bisa menyalahgunakan kekuasaan.

Komitmen Gus Dur dalam upaya membangun demokrasi pada ranah penegakan Hak Asasi Manusi tidak diragukan lagi. Hal ini bisa terlihat dari rentetan pembelaan Gus Dur terhadap minoritas yang termarginalkan, baik oleh negara maupun oleh masyarakat sekalipun.

Proceedings: International Conference on "Islam Nusantara, National Integrity, and World Peace" 2018
ISBN: 978-602-52411-1-6

kemanusiaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama. Tanpa nilai tersebut, dunia hanya dipenuhi oleh berbagai bentuk kekerasan dan konflik sosial. (Abdurrahman Wahid & Daisuka Ikede, 2010:118).

Gus Dur menjelaskan dalam Islam ada lima prinsip dasar sebagai penegakan Hak Asasi Manusia. Pertama, keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum. Hal ini mengandung arti bahwa pelaksanaan suatu pemerintahan harus berdasarkan aturan hukum yang menjamin perlakuan yang sama kepada setiap warga negara tanpa kecuali sesuai dengan hak-hak mereka dipandang perlu. Kedua, keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama. Ketiga, keselamatan keluarga dan keturunan. Prinsip ini merupakan pondasi etis dan moral yang di atasnya menurut pandangan Islam, suatu masyarakat dapat diwujudkan. Keempat, keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum. Prinsip ini sangat krusial dalam kaitannya dengan pembentukan masyarakat modern. Modernisasi telah mengakibatkan perbedaan peranan dan fungsi sebagaimana halnya proses individualisasi dalam masyarakat. Perlindungan hak-hak individu dan sosial, secara bertahap menjadi satu dari sekian banyak kebutuhan yang muncul dalam kehidupan modern. Dan kelima, keselamatan profesi. Hal ini menyiratkan bahwa dalam hal kebebasan individu, Islam membuka pintu bagi individu anggota masyarakat untuk memilih pilihan yang dianggap cocok dengan kehidupan seseorang.

e. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Gus Dur menyatakan ekonomi yang tajam antara yang kaya dan yang

miskin mengakibatkan hanya orang kaya yang menguasai demokrasi. Demokrasi hanya dijadikan alat bagi kelas kaya untuk mempertahankan posisinya. (Abdurrahman Wahid, 2006: 197). Kelas miskin hanya dijadikan obyek dalam proses politik, dan seringkali menjadi obyek penindasan kelas kaya terhadap kelas miskin. Maka prasyarat yang harus dipenuhi adalah terciptanya demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan, baik secara konsep atau penerapannya. (Abdurrahman Wahid Dkk, 2010: 91). Kalau dilihat dalam Islam, masalah kecukupan jelas ada aturannya, yaitu mencapai perolehan yang tinggi tanpa mencegah orang lain untuk mencapai hal yang sama. Kesamaan hak itu perlu mendapat tekanan. (Achmad Mufid AR, 2005: 88).

f. Penghargaan Terhadap Pluralitas

Gus Dur berpendapat bahwa pluralisme itu sangat penting karena ada tiga faktor dominan yang melatarbelakanginya. Pertama, keyakinannya pada nilai-nilai universal dalam Islam yang menjamin hak-hak warga negara. Kedua, menjunjung tinggi nilai kosmopolitan, bahwa semua individu dan kelompok dalam sebuah negara memiliki tempatnya sendiri, dan paksaan mayoritas adalah sebuah malapeta bagi pluralisme dan demokrasi. Ketiga, menyakini dan mengakui akan adanya perbedaan dengan tulus, merupakan faktor yang membuatnya memiliki integritas lintas etnik, agama, ras dan golongan. Sudah menjadi kenyataan, berdirinya negara Indonesia ini, adalah disebabkan oleh adanya kesadaran berbangsa daripada faktor ideologi Islam.

g. Pemberdayaan Masyarakat Sipil

Gagasan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat sipil ini diwujudkan oleh Gus Dur dengan mendirikan Forum Demokrasi

(Fordem). Pemberdayaan masyarakat sipil dalam demokrasi akan menjamin keutuhan bangsa Indonesia. Disadari, bahwa perikehidupan kebangsaan yang utuh itu hanya bisa tercapai dan tumbuh dalam suasana demokratis.

h. Islam dan Demokrasi

Pemikiran Demokrasi Gus Dur, secara tidak langsung mau tidak mau harus bersinggungan dengan dua kutub pemikiran Islam, apakah menolak demokrasi atau menerimanya.

Perdebatan Teoritis akan kecendrungan melupakan satu fakta, bahwa demokrasi, melebihi pro-kontra, terlebih harus diwujudkan pada tataran kehidupan. Pemikiran seperti ini bisa difahami, karena model pemikirannya yang berada dibawah cengkeraman otoritarianisme negara. Dari kita menjadi faham, mengapa Gus Dur menolak negara Islam. Bukannya Gus Dur tidak setuju dengan konsep tersebut, tetapi cita negara Islam dinegeri ini bersifat cocok dengan lapangan, karena dalam politik nyata, persoalan sebenarnya adalah pergulatan antara kepentingan negara yang hendak menduduki ideologi Islam. (Abdurrahman Wahid, 1999: xxv).

Menurut Gus Dur tidak penting bagaimana demokrasi didefinisikan, melainkan bagaimana demokrasi dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep kedaulatan hukum, penegakan Hak Asasi Manusia, peningkatan kesejahteraan rakyat, pentingnya pemahaman tentang pluralitas serta pemberdayaan masyarakat sipil.

Simpulan

Pemikiran-pemikiran Gus Dur tentang Demokrasi yang multikultural tergambar sebagai berikut yaitu 1). Kedaulatan Hukum, 2). Menengahkan Peradilan yang Bebas, 3) Adanya Instansi yang melakukan kajian

tentang kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan konstitusi, 4). Penegakan Hak Asasi Manusia, 5) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, 6) Penghargaan Terhadap Pluralitas, 7). Pemberdayaan Masyarakat Sipil, 8) Relevansi Islam dan Demokrasi

Daftar Rujukan

- Al-Mustaufi. M. Yahya, 2014. *Ajaran Sang Wali, Pemikiran Gus Dur dari Tasawuf hingga Demokrasi* (Jombang: Pustaka Al Khumul).
- Aly. Abdullah, 2015. *Studi deskriptif tentang nilai-nilai multikultural dalam pendidikan di pondok pesantren modern islam assalaam* Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume I, Nomer 1, Januari-Juni 2015.
- AR. Achmad Mufid, 2005. *Ada Apa dengan Gus Dur*. Jogjakarta: Kutub.
- Azra. Azumardi, 2005. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Bangun. Zakaria, 2008. *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*. Medan: Bina Media Perintis.
- Barton. Greg, 2002. *Biografi Gus Dur, The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKIS.
- Fuady. Munir, 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Revita aditama.
- Hasan. Muhamad Tholhah, 2016. *Pendidikan Multikultural, Sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme* (Malang: LP. Unisma).
- Huda. Ni'matul, 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Huntington. Samuel P., 1997. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

- Mahfud. Agus, 2012. *Ilmu Pendidikan Islam Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: Nadia Pustaka.
- Sidded. Khairul Anam, (Eds.). 2009. *Multikulturalisme dalam Islam: Memahami Prinsip, Nilai dan Tujuan Multikulturalisme dalam Islam untuk Mencapai Kualitas Keterpilihan, cet.ke-1*. Yogyakarta: program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Wahid. Abdurrahman, & Daisuka Ikede, 2010. *Dialog Perdaban untuk Toleransi dan Perdamaian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahid. Abdurrahman, (Eds.). 2010. *Islam Tanpa Kekerasan*, Jogjakarta: LkiS.
- Wahid. Abdurrahman, 2006. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, Jakarta: The Wahid Institut.
- Wahid. Abdurrahman, 2009. *Prsima Pemikiran Gus Dur*. Jogjakarta: Lkis.
- Yaqin. M. Ainul, 2005. *Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.